

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA. 018.09.0200.237242
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2018**

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2018



Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian
Jl. Tentara Pelajar No. 12, Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu Bogor, 16114
Tahun Anggaran 2018

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bogor, 31 Desember 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,



Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr
NIP. NIP. 196406231989031002

DAFTAR ISI

<u>KATA PENGANTAR</u>	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
II. NERACA	4
III. LAPORAN OPERASIONAL	6
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	7
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	8
A. PENJELASAN UMUM	8
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian	7
A.1.1 Sasaran Strategis	8
A.1.2 Langkah - Langkah Startegis	9
A.1.3. Capaian Kinerja BBSDLP TA 2018	9
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	12
A.3. Basis Akuntansi	12
A.4. Dasar Pengukuran	12
A.5. Kebijakan Akutansi	13
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	20
B.1. Pendapatan	20
B.2. Belanja	23
B.2.1. Belanja Pegawai	24
B.2.2. Berang Barang	24
B.2.3. Belanja Modal Tanah	25
B.2.4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26
B.2.5. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26
B.2.6. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	27
B.2.7. Belanja Modal Lainnya	27
B.2.8. Belanja Bantuan Sosial	27

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	28
C.1. Aset Lancar	28
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	28
C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan	28
C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas	29
C.1.4. Piutang Pajak	29
C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP/TGR)	29
C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	30
C.1.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar	30
C.1.8. Belanja Dibayar di Muka	31
C.1.9. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	31
C.1.10 Perediaan	31
C.1.11. Tagihan Tuntutan Perbedaharaan (TP/TGR)	32
C.1.12. Tagihan Penjualan Angsuran	32
C.1.13. Penyihan Piutang Tak Tertagih – piutang Jangka Panjang	33
C.2. Aset Tetap	33
C.2.1. Tanah	33
C.2.2 Peralatan Tanah	34
C.2.3. Gedung dan Bangunan	35
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	35
C.2.5. Aset Tetap Lainnya	35
C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	36
C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	36
C.3. Aset Lainnya	37
C.3.1. Aset Tak Berwujud	37
C.3.2. Aset Lain-lain	37
C.3.3. Akumulasi Penyusunan Aset Lainnya	38
C.3.4. Uang Muka Dari Kppn	39

C.3.5. Utang Kepada Pihak Ketiga	39
C.3.6. Pendapatan Diterima di Muka	39
C.4. Ekuitas	40
C.4.1. Ekuitas	40
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	41
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.....	41
D.2. Beban Pegawai.....	43
D.3. Beban Persediaan	44
D.4. Beban Barang dan Jasa	44
D.5. Beban Pemeliharaan	45
D.6. Baban Perjalanan Dinas	45
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	46
D.8. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	46
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	47
E.1. Ekuitas Awal	47
E.2. Surplus/Defisit – LO	47
E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar.....	47
E.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	47
E.5. Penyesuain Nilai Aset	47
E.6. Transaksi antar Entitas	47
E.7. Ekuitas Akhir	47
F. PENGUNGKAPAN – PENGUNGKAPAN LAINNYA	48
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	48
F.2. Pengungkapan Lain-lain	48
3. Rekening Pemerintah	50
4. Kemitraan dengan pihak Ketiga	51
5. Sertifikat ISO 9001:2008	51

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Traksaksi DIPA dan Revisi DIPA 2018
- Lampiran 2 Estimasi Pendapatan sampai September 2018
- Lampiran 3 Daftar SPM dan SP2D sampai September 2018
- Lampiran 4 Pendapatan September 2018
- Lampiran 5 Rekonsiliasi Berjalan September 2018
- Lampiran 6 Rekonsiliasi dengan SIMAK BMN September 2018
- Lampiran 7 Neraca Percobaan September 2018
- Lampiran 8 Laporan Operasional September 2018
- Lampiran 9 Laporan Perubahan Ekuitas September 2018
- Lampiran 10 Neraca September 2018
- Lampiran 11 Laporan Realisasi Anggaran September 2018
- Lampiran 12 Laporan Realisasi Belanja September 2018
- Lampiran 13 Laopran Pengembalian Belanja September 2018
- Lampiran 14 Laporan Pengembalian Belanja September 2018
- Lampiran 15 Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Tahun 2018 dan Stock Opname Barang Persediaan s/d September 2018.
- Lampiran 16 Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Tahun 2018 dan Stock Opname Barang Persediaan s/d September 2018.
- Lampiran 17 Berita Acara Rekonsiliasi sampai September 2018 dengan KPPN/SPAN 2018
- Lampiran 18 Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi 2018
- Lampiran 19 Laporan BUKU KAS UMUM Berdasarkan APLIKASI 2018
- Lampiran 20 Laporan BUKU PEMBANTU PAJAK Berdsasarkan APLIKASI 2018
- Lampiran 21 Berita Acara Rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan dengan Operator SAKPA September 2018 dan Lain-lain Di Bendahara Pengeluaran

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, 31 Desember 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr
NIP. NIP. 196406231989031002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 314.283.821,00 atau mencapai 568.84% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 55.250.000,00,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp. 33.712.146.089,- atau mencapai 96.00% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 35.117.324.000,00,-

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 74.010.047.030,00,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 36.925.812,00,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 50.218.108.282,00,-; Piutang Jangka Pendek (neto) sebesar Rp. 51.086.527,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 24.755.012.936,00,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 51.086.527,00 dan Rp. 74.958.960.503,00,-, Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Rp. 74.958.960.503,00,-.

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO Negara Bukan Pajak Lainnya Rp. 239.524.171,00. Jumlah pendapatan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 239.524.171,00,-, sedangkan jumlah beban operasional terdiri Beban Pegawai Rp. 5.990.075.515,00, Beban Persediaan Rp. 4.586.010.200,00, Beban Barang dan Jasa Rp. 4.586.010.200,00, Beban Pemeliharaan Rp. 1.349.709.263,00, Beban Perjalanan Dinas Rp. 10.372.833.690,00, Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 3.306.318.904,00 dan penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp. 171.288,00. Beban untuk periode sampai 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 35.380.550.318,00,- sehingga terdapat Defisit Dari Kegiatan Operasional senilai Rp. -35.140.854.859,00,-. Kegiatan Non Operasional Lainnya, Untuk Surplus Pelepasan Aset Non Lancar Rp. 0,00,-, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka

Panjang Rp. 0,00-, Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp. 109.017.250,00,-. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp. 616.500,00,- Surplus Rp. (74.143.150,00,-) dari Kegiatan Non Operasional Rp. 108.400.750,00,-. Pos Luar Biasa. Beban Luar biasa Rp.0,00,-. Defisit Dari Pos Luar Biasa Rp.0,00 sehingga Surplus Defisit-LO sebesar Rp. -35.032.625.397,00,-.

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp. 76.591.987.918,00,- ditambah Defisit-LO sebesar Rp. – 35.032.625.397,00,- kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi Penyesuaian Nilai Aset, Koreksi Nilai Persediaan, Selesih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi, Koreksi Lainnya senilai Rp. 0,00,-. Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 33.399.597.982,00,-, kenaikan dan penurunan Ekuitas Rp. 1.633.027.415,00,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp. 74.958.960.503,00,-.

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	Catatan	30 Desember 2018			2017
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	55.250.000,00	314.283.821,00	568.84	178.170.389,00
Jumlah Pendapatan		55.250.000,00	96.888.700,00	568.84	178.170.389,00
BELANJA	B.2				
Belanja Operasional					
Belanja Pegawai	B.2.1	6.186.000.000,00	5.990.075.515,00	96.83	3.405.340.857,00
Belanja Barang	B.2.2	27.163.944.000,00	26.034.994.484,00	95.84	8.226.408.640,00
Jumlah Belanja Operasi		33.349.944.000,00	32.025.069.999,00	96.03	11.631.749.497,00
Belanja Modal					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	B.2.3	1.767.380.000,00	1.687.076.090,00	95.46	677.323.900,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	B.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	B.2.5	0,00	0,00	0,00	172.500.000,00
Jumlah Belanja Modal		1.767.380.000,00	1.687.076.090,00	95.46	849.823.900,00
Jumlah Belanja		35.117.324.000,00	33.712.146.089,00	96.00	849.823.900,00

BoGOR, 31 Desember 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr
NIP. NIP. 196406231989031002

II. NERACA

**BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
NERACA**

PER 31 Desember 2018 dan 30 DESEMBER 2017

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ASET			
Aset Lancar			
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1	34.257.600,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.2	(171.288,00)	0,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		34.086.312,00	0,00
Persediaan	C.1.3	2.839.500,00	1.359.600,00
Jumlah Aset Lancar		36.925.812,00	1.359.600,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	13.152.236.000,00	13.152.236.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	24.059.402.736,00	22.378.686.916,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	31.683.564.916,00	31.683.564.916,00
Jalan dan Jembatan	C.2.4	86.955.000,00	786.401.000,00
Irigasi	C.2.5	699.446,000	699.446,000
Aset Tetap Lainnya	C.2.6	337.857.500,00	337.857.500,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.7	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.8	- 18.368.433.332,00	- 16.122.355.445,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.9	- 1.373.076.711,00	- 457.692.237,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, dan Jaringan	C.2.9	- 28.985.001,00	- 9.661.667,00
Akumulasi Penyusutan Irigasi	C.3.0	- 30.857.910,00	- 10.285.970,00
Jumlah Aset Tetap		50.218.108.282,00	51.738.750.097,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1	27.728.454.093,00	27.720.293.823,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2	- 2.973.441.157,00	- 2.868.415.602,00
Jumlah Aset Lainnya		24.755.012.936,00	24.851.878.221,00
Jumlah Aset		75.010.047.030,00	76.591.987.918,00
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada pihak ketiga	C.4.1	51.086.527,00	,00
Jumlah Kewajiban Jangka pendek		51.086.527,00	,00
Jumlah kewajiban		51.086.527,00	,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.1	74.958.960.503,00	76.591.987.918,00
Jumlah Ekuitas		74.958.960.503,00	76.591.987.918,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		75.010.047.030,00	76.591.987.918,00

Bogor, 31 Desember 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr

NIP. 196406231989031002

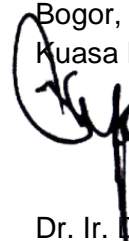
A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a vertical line and some smaller strokes.

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2018 dan 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	239.524.171,00	127.219.219,00
JUMLAH PENDAPATAN		239.524.171,00	127.219.219,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	5.990.075.515,00	6.761.942.214,00
Beban Persediaan	D.3	4.586.010.200,00	3.305.807.500,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	9.775.431.458,00	8.775.349.336,00
Beban Pemeliharaan	D.5	1.349.709.263,00	1.474.649.220,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	10.372.833.690,00	8.472.058.114,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	3.306.318.904,00	3.612.767.627,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	171.288	,00
JUMLAH BEBAN		35.380.550.318,00	32.402.574.011,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		- 35.141.026.147,00	-32.275.354.792,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	0,00	8.800,00,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	109.017.250,00	453.772.154,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	616.500,00	7.863.600,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		108.400.750,00	454.015.554,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		- 35.032.625.397,00	- 31.821.339.238,00

Bogor, Desember 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,




Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr
NIP. NIP. 196406231989031002

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
EKUITAS AWAL	E.1	76.591.987.918,00	70.778.621.157,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	- 35.032.711.709,00	- 31.821.339.238,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0,00	8.496.103.023,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.3	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.4	0,00	8.496.103.023,00
Koreksi Lain-lain	E.4.5	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.6	33.399.597.982,00	29.138.602.976,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.7	- 1.667.113.727,00	5.813.366.761,00
EKUITAS AKHIR		74.924.874.191,00	76.591.987.918,00

Bogor, Desember 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,


Dr. Ir. Ded Nursyamsi, M.Agr
NIP. NIP. 196406231989031002

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian

Balai Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan (berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian 37/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (a) pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian; (b) pelaksanaan pemetaan dan evaluasi sumberdaya lahan serta pengembangan wilayah, (c) pelaksanaan analisis dan sintesis kebijakan pemanfaatan sumberdaya lahan pertanian, (d) pelaksanaan pengembangan komponen teknologi sistem usaha pertanian bidang sumberdaya lahan pertanian, (e) pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian; (f) pelaksanaan pengembangan sistem informasi hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian, dan (g) pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, keuangan, dan perlengkapan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian. Selain melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor: 157/Kpts/OT.160/J/7/2006 tanggal 10 Juli 2006, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian juga diberi tugas untuk mengkoordinir Pelaksanaan Kegiatan Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa, Balai Penelitian Tanah, Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, dan Balai Penelitian Lingkungan Pertanian. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian bertujuan untuk mendukung program Badan Litbang Pertanian terkait dengan empat sukses pembangunan pertanian. Melalui peranan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian diharapkan dapat fokus kepada:

1. Dukungan terhadap program intensifikasi sumberdaya lahan eksisting produktif:
 - a. Memfokuskan pada penciptaan inovasi teknologi pengelolaan lahan dan pemupukan, baik pupuk organik, an-organik, hayati dan pembenah tanah, pemulihan lahan serta teknologi inovasi pengelolaan air dan iklim.
 - b. Memprioritaskan penyediaan dan diseminasi inovasi teknologi tanah dan pemupukan, efisiensi air dan kesesuaian iklim untuk meningkatkan produktivitas sumberdaya lahan.

2. Dukungan terhadap upaya optimalisasi sumberdaya lahan terlantar dan terdegradasi (bongkor, lahan tidur) dan lahan sawah bukaan baru:
 - a. Memfokuskan pada penciptaan inovasi teknologi pengelolaan lahan, reklamasi, pemupukan dan pengelolaan air untuk perbaikan dan peningkatan kesuburan lahan.
 - b. Menyediakan informasi potensi dan karakteristik sumberdaya lahan terlantar, terdegradasi dan sawah bukaan baru.
 - c. Memprioritaskan penyediaan dan diseminasi inovasi teknologi tanah dan pemupukan, efisiensi air dan kesesuaian iklim untuk meningkatkan produktivitas sumberdaya lahan terlantar, terdegradasi dan sawah bukaan baru.
3. Dukungan terhadap upaya pengamanan produksi pertanian akibat ancaman variabilitas dan perubahan iklim serta bencana lainnya:
 - a. Memfokuskan pada penciptaan inovasi teknologi pengelolaan lahan dan air adaptif untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana lainnya.
 - b. Mengembangkan sistem informasi iklim, Sistem Informasi Geografi (GIS) dan remote sensing sumberdaya lahan wilayah rentan dan rawan bencana.
 - c. Memprioritaskan penyediaan dan diseminasi inovasi teknologi pengelolaan tanah, pemupukan, dan air yang adaptif terhadap perubahan iklim dan ancaman bencana lainnya.

Untuk mewujudkan tujuan diatas BBSDLP berkomitmen dengan visi :

“Menjadi lembaga litbang penyedia informasi dan teknologi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian berkelas dunia untuk mewujudkan pertanian industrial unggul berkelanjutan”.

1. Menghasilkan, mengembangkan dan mendiseminasikan data/informasi, inovasi teknologi serta rekomendasi kebijakan di bidang sumberdaya lahan pertanian yang berwawasan lingkungan dan berbasis sumberdaya lokal guna mendukung terwujudnya pertanian industrial unggul kelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya penelitian sumberdaya lahan serta efisiensi dan efektivitas pemanfaatannya.
3. Mengembangkan jaringan kerjasama nasional dan internasional dalam rangka penguasaan iptek dan peningkatan peran litbang sumberdaya lahan dalam pembangunan pertanian.

A.1.1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang ingin dicapainya BBSDLP yaitu meliputi :

1. Tersedianya data, informasi dan peningkatan inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian.
2. Terselenggaranya diseminasi inovasi teknologi sumberdaya lahan pertanian.

A.1.2. Langkah-Langkah Strategis

1. Pendekatan penelitian dimulai dengan menetapkan luaran yang akan dihasilkan (*output oriented*). Luaran yang dihasilkan harus mempunyai nilai tambah ilmiah dan komersial, dihasilkan dalam waktu singkat serta dapat dimanfaatkan oleh pengguna.
2. Menyempurnakan manajemen penelitian dari mulai perencanaan sampai mencapai hasil penelitian yang akuntabel dan *good governance*.
3. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan lembaga penelitian, dunia usaha dan mitra kerja lainnya perlu dilakukan dalam rangka menggali dan meningkatkan dana penelitian; pengakuan ilmiah internasional (*scientific recognition*).
4. Mempercepat dan meningkatkan diseminasi, promosi serta penjangkaran umpan balik inovasi teknologi dan kebijakan sumberdaya lahan dalam rangka meningkatkan manfaat dan dampak inovasi teknologi yang dihasilkan.
5. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan kapabilitas sumberdaya penelitian melalui pelatihan SDM, penambahan sarana dan prasarana, dan struktur penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan institusi litbang sumberdaya lahan yang berkelas dunia.
6. Mendorong inovasi teknologi yang mengarah pada pengakuan dan perlindungan HaKI (Hak Kekayaan Intelektual) secara nasional dan internasional.

A.1.3 Capaian Kinerja BBSDLP TA 2018

1. Perencanaan Kinerja Tahun 2018

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun Anggaran 2017, telah ditetapkan program, kegiatan utama beserta target output dalam upaya pencapaian sasaran pada TA 2018.

Seluruh kegiatan utama yang dilaksanakan di BBSDLP beserta balai-balai yang dikoordinasikannya merupakan dukungan terhadap Program Penciptaan Teknologi Varietas Unggul Berdaya Saing. Kegiatan utama yang telah ditetapkan adalah Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian. Dari kegiatan tersebut target yang ingin dicapai disajikan pada tabel berikut:

Rencana Kinerja Tahunan lingkup BBSDLP, TA 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian		
- Program Penciptaan Teknologi dan	1. Jumlah Peta Potensi Sumberdaya Lahan Pertanian, Status Hara, Kalender Tanam, dan Pencemaran	117 Peta

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan yang menghasilkan Tersedianya data, informasi dan peningkatan inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian	Lingkungan	
	2. Jumlah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian (Tanah, Air dan Lingkungan Pertanian)	3 Teknologi
	3. Jumlah Desiminasi inovasi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian	4 Teknologi
	4. Jumlah Rekomendasi teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian	2 Rekomendasi
	5. Jumlah Informasi Data Base pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian .	5 Informasi
	6. Jumlah Perubahan Iklim Pertanian (TSP)	1 Teknologi
	7. Jumlah Sistem Informasi dan Database Sumberdaya Lahan Pertanian	1 Teknologi
	8. Jumlah Layanan Internal	2 Layanan
	9. Layanan Perkatoran	12 Bulan
PAGU ANGGARAN	Rp. 34.613.734.000,-	

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2018, lingkup BBSDLP merencanakan untuk: (1) menghasilkan Peta 117 Potensi Sumberdaya lahan Pertanian, Status Hara, Kalender Tanam, dan Pencemaran Lingkungan, (2) menghasilkan 3 teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian (Tanah, Air dan Lingkungan Pertanian) untuk informasi, (3) menghasilkan 4 teknologi desiminasi teknologi Pengelolaan sumberdaya lahan pertanian, (4) menghasilkan 2 rekomendasi kebijakan pengelohan sumberdaya lahan pertanian, (5) menghasilkan 4 Sistem informasi dan Database Sumberdaya Daya Lahan Pertanian, (6) menghasilkan 3 Teknologi untuk lahan eks pertambangan dan pemetaan, (7) menghasilkan 9 Sistem Informasi dan Database Sumberdaya Lahan Pertanian (8) 1 teknologi untuk mitigasi perubahan iklim dan menghasilkan 2 layanan Pelayanan Perkantoran selama 12 bulan untuk Pertanian.

2. Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini diuraikan kriteria keberhasilan (realisasi terhadap target), sasaran kegiatan yang dilaksanakan serta permasalahan dan upaya yang telah dilakukan. Untuk mengukur keberhasilan kinerja ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan, yaitu (1) **sangat berhasil** : > 100 persen; (2) **berhasil** : 80 – 100 persen; (3) **cukup berhasil** : 60 – 79 persen; dan (4) **tidak berhasil** : 0 – 59 persen.

3. Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2018

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun Anggaran 2018, Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian mempunyai Sasaran Strategis dengan 9 indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai.

Berdasarkan data hasil kegiatan BBSDLP, Pencapaian Indikator Kinerja sasaran kegiatan utama BBSDLP pada tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Sasaran BBSDLP Desember 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian				
- Meningkatnya Inovasi dan diseminasi teknologi pertanian	1. Jumlah Peta Potensi Sumberdaya Lahan Pertanian, Status Hara, Kalender Tanam dan Pencemaran Lingkungan	92 Peta	92.00	96.98
	2. Jumlah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian (Tanah, Air dan Lingkungan Pertanian)	3 Teknologi	3.00	92.46
	3. Jumlah Desiminasi Inovasi Teknologi Pengelolaan Lahan Pertanian	4 Teknologi	4.00	93.61
	4. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian dan Perubahan Iklim	2 Rekomendasi	2.00	93.35
	5. Jumlah Sistem Informasi dan Database Sumberdaya Lahan Pertanian	4 Sistem Informasi	4.00	93.35
	6. Jumlah Layanan Internal (Overhad)	2 Layanan	2.00	92.42
	7. Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan	12,00	94.42
Pagu Anggaran	Rp. 35.117.324.000,-			
Realisasi Anggaran	Rp. 33.712.886.376,- (96.00%)			

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator kinerja sasaran BBSDLP sampai Desember 2018 untuk sasaran pertama mencapai rata-rata 59.67% menunjukkan tingkat Proses Pekerjaan belum tercapai masih dalam proses Pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

Beberapa kendala yang dihadapi BBSDLP dalam upaya pencapaian sasaran tersebut antara lain: keterbatasan SDM berkualitas dan berkeahlian khusus, serangan hama dan penyakit pada tanaman percobaan, serta kondisi cuaca, dan kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan. Sehingga dapat mengganggu proses pelaksanaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Itu semua menunjukkan komitmen yang tinggi dari para peneliti untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BBSDLP sampai Desember 2018 dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja tahun 2018 yang masih proses penyelesaian pekerjaan sehingga sasaran atau target belum bisa tercapai.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negaraserta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban

dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - b) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

- c) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukansetiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat(tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini

diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan dari Penjualan Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	55.250.000,00	55.250.000,00
Jumlah Pendapatan	55.250.000,00	55.250.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	6.786.000.000,00	6.186.000.000,00
Belanja Barang	33.378.521.000,00	27.163.944.000,00
Belanja Modal	1.767.380.000,00	1.767.380.000,00
Jumlah Belanja	41.931.901.000,00	35.117.324.000,00

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 314.283.821,00,- atau mencapai 568.84% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 55.250.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	7.250.000,00	8.161.471,00	112,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	48.000.000,00	219.432.700,00	457.15,00
Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	11.930.000,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang tahun Anggaran yang Lalu	0,00	74.759.850,00	0,00
Jumlah Penerima	55.250.000,00	314.283.821,00	568.84

Realisasi Pendapatan TA 2018 mengalami penurunan sebesar 54.% dibandingkan TA 2017. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	Realisasi 29 Desember 2018	Realisasi 2017	.%
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	8.161.471,00	118.998.000,00	15,00
Pendapatan Pemindahtanganan BMN	,00	8.800.000,00	,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	219.432.700,00	8.161.471,00	27,00
Pendapatan Jasa Lainnya	11.930.000,00	59.748,00	200,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang tahun Anggaran yang Lalu	74.759.850,00	448.355.054,00	,00
Jumlah	314.283.821,00	584.374.273,00	54,00

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2018 dan 2017 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNPB pada TA 2018 mengalami penurunan sebesar 54% persen dari realisasi pendapatan dari PNPB TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain karena penurunan kegiatan dan penjualan peta BBSDLP baik dalam bentuk file JPEG maupun format SHP menurun dan Pengembalian Belanja Anggaran yang menurun sampai Desember 2018.

Pendapatan Negara dan Hibah Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian TA 2018 terdiri dari:

1. Pendapatan penjualan Peta Tanah Skala 1:50.000 Kab. Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur sebesar 7,343 MB dalam format SHP sebesar Rp. 7.343.300,- tanggal 1 Maret 2018, Nomor NTPN. B10D41FCV6HA1GUI.
2. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 1.170.00, tanggal 6 Maret 2018 dengan NPTN. EA3E53BC9SGA7IP2.
3. Pendapatan penjualan Peta Tanah rekomendasi Pengolahan sebesar Rp. 135.000,- tanggal 6 maret 2018 dengan NPTN 3E59A3BE85H98OP2.
4. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 450.000,- tanggal 9 Maret 2018 dengan NPTN. 9A7A35HLN7C61U2I.

5. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 1.100.000,- tanggal 19 Maret 2018 dengan NPTN. 60FC63GHAOVN2ANI.
6. Pendapatan penjualan Peta Arah an sebesar Rp. 933.000,- tanggal 22 Maret 2018 dengan NPTN. 38B9655VQ21D7512.
7. Pendapatan penjualan Peta Tanah dan pendapatan hasil survai sebesar Rp. 814.000,- tanggal 29 Maret 2018 dengan NPTN. 8FAA419KG2C8MVCI.
8. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 405.000,- tanggal 5 April 2018 dengan NPTN. E3E694B3B7280611.
9. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 300.000,- tanggal 5 April 2018 dengan NPTN. E11814B4754FB6II.
10. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 15.161.000,- tanggal 13 April 2018 dengan NPTN. 7CB831A31E7DQQMI.
11. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 1.070.000,- tanggal 17 April 2018 dengan NPTN. F01E1310PMMUIIOI.
12. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 45.000,- tanggal 20 April 2018 dengan NPTN. 8F59E67JNJAPN529.
13. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 1.180.000,- tanggal 24 April 2018 dengan NPTN. 38BBC6CVTQKG2P42..
14. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 100.000,- tanggal 25 April 2018 dengan NPTN. 034A070G3PABE8SI.
15. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 405.000,- tanggal 30 April 2018 dengan NPTN. F84A827RNJ0OEN2.
16. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 2.128.000,- tanggal 30 April 2018 dengan NPTN. 5C96327RSKUH27N2.
17. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 245.000,- tanggal 14 Mei 2018 dengan NPTN. BDC948QMS70TUJI2.
18. Pendapatan penjualan Peta Tanah dan Pengolahan Data Reproduksi Peta, Jasa Tenaga sebesar Rp. 811.000,- tanggal 18 Mei 2018 dengan NPTN. 682384OG9ENITP32.
19. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 180.000,- tanggal 25 Mei 2018 dengan NPTN. 9282B7SERR544CEP.

20. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 591.000,- tanggal 30 Mei 2018 dengan NPTN. 87CE5170DMTKQE91.
21. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 45.000,- tanggal 30 Mei 2018 dengan NPTN. 337C171T4VDUP92.
22. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 180.000,- tanggal 31 Mei 2018 dengan NPTN. 88D682CJRJKJHV11.
23. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 1.039.000,- tanggal 5 Juni 2018 dengan NPTN. 168B840V6ACIPMMI.
24. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 9.112.000,- tanggal 7 Juni 2018 dengan NPTN. C264A5J5NAIRAA7I.
25. Pendapan Penjualan Peta Tanah Kabupaten Bekasi Skala 1 : 250.000 tanggal 2 Juli 2018 sebesar Rp. 200.000,- dengan Nomor NPTN 8 A3334LA5LQSE1V2.
26. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Tanah Kab. Lumajang skala 1 : 50.000 sebanyak 936 KB dalam Format SHP. Tanggal 04 Juli 2018 sebesar Rp. 936.000,- dengan Nomor NPTN 80813670656VBTG9.
27. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Tanah Kab. Lombok Timur Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, dan Kota Mataram, Skala 1;50.000 KB dalam format SHP sebesar Rp. 5.842.000,- Nomor NPTN EE1CA67006KDEBG9 .
28. Pendapatan Hasil Penjualan Petah Peta Tanah Kab. Lombok Timur dan Lombok Utara sebanyak 2.840 KB dalam format SHP. Sebesar RP. 2.840.000,- Nomor NPTN : AD3367R26R752S11
29. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Tanah Kab. Garut Skala 50K sebanyak 32.4 KB dalam format SHP. Sebesar Rp. 32.400,- dengan Nomor NPTN 16DE87R2KGU80J11.
30. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Tanah Propinsi Bali skala 1:250.000 sebanyak 5.960 dalam format SHP Nomor NPTN D86E57R3SM5EID11
31. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Tanah Kab. Sijunjung, skala 1:50.000 sebanyak 1 lembar dalam format JPEG sebesar Rp. 45.000 dengan Nomor NPTN 9768623T5JP261L2.
32. Pendapatan Hasil Penjualan Tanah Kab. Pandeglang Skala 1:50.000 sebanyak 3.000 KB dalam format SHP tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp.3.000.000 dengan Nomor NPTN C24B03OEL28N47U1

33. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Tanah Kab. Tangerang, Garut Indramayu, Kutai Timur dan Kutai Kartanegara skala 1:50.000 sebanyak 14 lembar dalam format PDF/JPEG tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp.630.000 dengan NPTN 58C8D4QHVTFEBRN2.
34. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Tanah Kabupaten Kediri Skala 1:50.000 sebesar 566 KB dalam format SHP. Tanggal 23 Agustus 2018 sebesar Rp.566.000 dengan NPTN D74911
35. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Tanah Kabupaten Bogor Skala 1:50.000 sebanyak 1 lembar format PDF/JPEG tanggal 23 Agustus 2018 sebesar Rp. 45.000 dengan NPTN D6AF01NTF038URJ1
36. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Tanah Kabupaten Pulang Pisang dan Kapuas skala 1:50.000 sebesar Rp. 2.910.000,- dalam format SHP tanggal 27 Agustus 2018 dengan NPTN EC22131GB1LLUL1
37. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Kesesuaian Lahan Kab.Timor Tengah Utara, Skala 1:50.000 sebanyak 5.580 KB dalam format SHP tanggal 17 September 2018 sebesar Rp.5.580.000,- dengan Nomor NPTN A2AEB65JTV215BII.
38. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Kesesuaian Peta Lahan Kab. Sintang Skala 1:50.000 sebanyak 6,980 KB dalam Format SHP tanggal 17 September 2018 sebesar Rp. 6.980.000,- dengan nomor NPTN E87D465LP1KO0UII.
39. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Tanah Kab. Bangka Barat, Pangkal Pinang, skala 1:50.000 sebanyak 60 lembar dalam format JPEG tanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 2.700.000,- dengan Nomor NPTN C74207BEB30PT3B2.
40. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Tanah Kab. Mandaling Natal Skala 1:50.000 sebanyak 1,950 KB dalam format SHP tanggal 26 September 2018 sebesar Rp. 1.950.000,- dengan nomor NPTN F91D839EEH8HSGF2.
41. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Tanah Kb. Sarolangun (CLIP), Skala 1:50.000,- sebanyak 50 KB dalam format SHP tanggal 26 September 2018 sebesar Rp. 50.000,- dengan nomor NPTN 3FD3439F1NU2U2F2
42. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Tanah Prov. Bali Skala 1:250.000 sebanyak 1 lembar dalam format JPEG tanggal 26 September 2018 sebesar Rp. Rp.45.000,- dengan Nomor NPTN F98FE39GQ6MJ3KF2.
43. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Kesesuaian Lahan Kab. Karawang, Nganjuk, Karo, Merauke, dan Sindenreng Rappang, Skala 1:50.000 sebanyak 70 lembar dengan

format PDF tanggal 26 September 2018 sebesar Rp.3.150.000,- dengan Nomor NPTN 155B639HE005KOF2.

44. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Gambut Kec. Banama Tingang skala 1:50.000 sebanyak 50 KB dalam format SHP tanggal 26 September 2018 sebesar Rp. 50.000,- dengan Nomor NPTN 2C08F39I8FG98RF2.
45. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Gambut Kec. Banama Tingang dan Kahayan Tengah Skala 1:50.000 sebanyak 50 KB dalam format SHP tanggal 26 September 2018 Rp. 50.000,- dengan Nomor NPTN 6262639J7TAPHF2.
46. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Tanah Kab. Way Kanan skala 1:50.000 sebanyak 8,430 KB dalam format SHP dengan Nomor NPTN 703513U9MRCCS071. Rp. 8.430.000,-
47. Pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan bulan oktober 2018 Rp. 8.161.471,-
48. Pendapatan Hasil Survai dan Pemetaan dan pengembangan Iptek bulan Oktober 2018 Rp.30.603.000,-
49. Pendapatan Jasa Lainnya bulan Oktober 2018 Rp. 720.000,-
50. Penerimaan kembali belanja barang Tahun Anggaran yang lalu bulan Oktober 2018 Rp.74.759.650,-
51. Pendapatan Hasil Survai dan Pemetaan bulan Nopember 2018 Rp.4.320.000,-
52. Pendapatan Jasa Lainnya Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi Bulan Nopember 2018 Rp. 320.000,-
53. Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan Bulan Desember 2018 Rp.98.198.000,-
54. Pendapatan Jasa Tenaga Pekerjaan dan Informasi bulan Desember 2018 Rp. 315.000,-

B.2. Belanja

Realisasi Belanja pada per Desember TA 2018 adalah sebesar Rp. 33.712.146.089,- atau 96.00% dari anggaran belanja sebesar Rp. 335.117.324.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2018

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	6.188.000.000,00	5.990.075.515,00	96.83

Uraian	2018			
	Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Barang		27.163.944.000,00	26.034.994.484,00	95.84
Belanja Modal		1.767.380.000,00	1.687.076.090,00	95.46
Total Belanja Kotor		35.117.324.000,00	33.712.886.376,00	96.00
Pengembalian Belanja			-740.287,00	0.00
Total Belanja Bersih		35.117.324.000,00	33.712.146.089,00	96,00

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan kegiatan untuk tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	2018			
	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	.%
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian		35.117.324.000,00	33.712.886.376,00	96.00
Total Belanja Kotor		35.117.324.000,00	33.712.886.376,00	96.00
Pengembalian Belanja			-740.287,00	0.00
Total Belanja Bersih		35.117.324.000,00	33.712.146.089,00	96,00

Dibandingkan dengan Tahun 2017, Realisasi Belanja Per Desember TA 2018 mengalami penurunan sebesar Kurang lebih 5 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain. Realisasi Anggaran Tahun 2017 merupakan realisasi sesuai target pagu anggaran perencanaan sampai akhir tahun sehingga terdapat perbedaan dengan penyerapan per Desember 2018, karena Anggaran kegiatan tahun 2017 lebih kecil dibandingkan tahun anggaran 2018 sampai akhir tahun sehingga terdapat perbedaan realisasi Anggaran 2017 dan Anggaran 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja Desember 2018 dan 2017

Uraian	Realisasi Desember 2018	Realisasi Desember 2017	.%
Belanja Pegawai	5.990.075.515,00	6.761.942.214,00	1.13
Belanja Barang	20.034.994.484,00	22.027.853.370,00	1.10
Belanja Modal	1.687.076.090,00	853.663.900,00	0.51
Total Belanja	33.117.324.000,00	29.643.459.484,00	0.90

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.990.075.515,00,- dan Rp. 6.761.942.214,00,- Realisasi belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 28.96% dari TA 2017.

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan Desember 2017

Uraian	Realisasi Desember 2018	Realisasi Desember 2017	Naik (Turun) %
Gaji Pokok PNS	3.979.420.420,00	4.522.855.400,00	-12.01
Pembulatan Gaji PNS	49.026,00	49.851,00	-1.65
Tunjangan Suami/Istri PNS	279.176.138,00	291.079.000,00	-4.06
Tunjangan Anak PNS	66.043.512,00	76.692.098,00	-13.88
Tunjangan Struktural PNS	96.055.000,00	48.920.000,00	96.35
Tunjangan Fungsional PNS	737.180.000,00	941.525.000,00	-21.70
Tunjangan PPh PNS	55.875.859,00	65.586.205,00	-14.80
Tunjangan Beras PNS	160.627.560,00	186.336.660,00	-13.79
Uang Makan PNS	430.184.000,00	462.005.000,00	-6.88
Tunjangan Umum PNS	81.650.000,00	78.025.000,00	4.64
Belanja Lembur	103.801.000,00	88.868.000,00	16.80
Jumlah Belanja Kotor	5.990.075.515,00	6.761.942.214,00	28.96

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 26.034.994.484,00,- dan Rp. 22.027.853.370,00,- Realisasi belanja barang TA 2018 mengalami penurunan sebesar 2.39% dari TA 2017 walaupun penyerapan realisasi lebih. Hal ini disebabkan antara lain penambahan kegiatan dan anggaran Balai Besar Sumberdaya lahan pertanian.

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan Desember 2017

Uraian	Realisasi Desember 2018	2017 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Keperluan Perkantoran	1.362.722.340,-	1.198.020.983,-	0.88
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos	5.199.000,-	4.697.000,-	0.90
Belanja Honor Operasional Satker	221.512.500,-	232.896.000,-	1.05
Belanja Barang Operasional Lainnya	102.278.470,-	105.079.400,-	1.03
Belanja bahan	841.188.750,-	940.631.965,-	1.12
Belanja Honor Output Kegiatan	2.606.939.600,-	2.555.530.000,-	0.98
Belanja barang Non Operasional lainnya	2.297.621.687,-	1.655.988.587,-	0.72
Belanja barang Persediaan Konsumsi	4.623.004.950,-	3.574.435.926,-	0.77

Uraian	Realisasi Desember 2018	2017 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja langganan Listrik	635.633.694,-	652.364.703,-	1.03
Belanja Langganan Telepon	19.536.460,-	23.061.998,-	1.18
Belanja Langganan Air	10.822.430,-	6.756.700,-	0.62
Belanja Jasa Konsultan	19.470.000,-	11.000.000,-	0.56
Belanja Sewa	1.108.360.000,-	697.040.000,-	0.63
Belanja Jasa Profesi	493.060.000,-	690.300.000,-	1.40
Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan	415.929.000,-	386.848.800,-	0.93
Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin	879.605.563,-	821.125.194,-	0.93
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.275.000,-	0,-	0
Belanja Perjalanan Biasa	9.867.420.990,-	7.649.276.194,-	0.78
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	64.935.000,-	92.100.000,-	1.42
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	440.477.700,-	730.681.920,-	1.66
Jumlah Belanja Kotor	26.034.994.484,00	22.027.853.370,00	0.85

B.2.3 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2017 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pada tahun 2018 tidak terdapat belanja modal tanah pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2018 dan 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Moda Tanah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	0,00	0,00

B.2.4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.687.076.090,00 dan Rp. 849.823.900,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 10.40 % dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 1.675.060.790,- pembelian berupa :
 - a. CV. Solusi Arya Prima Pembayaran Peralatan dan Mesin Rp. 34.025.000,- Sesuai dengan Kontrak tanggal 10 April 2018 berupa Camera digital.
 - b. PT. Air Mas Perkasa Pembayaran Peralatan dan Mesin sesuai kontrak tanggal 27 Mei 2018 Rp. 24.646.240,- berupa Laptop untuk vidio editing.

- c. PT. Myacco Global Indonesia Pembayaran Peralatan dan Mesin Sesuai Kontrak tanggal 11 April 2018 PC untuk Deswork ASUS sebesar Rp. 31.635.320,-
- d. PT. Access Lintas Solusi 18 Mei 2018 Pembayaran Perangkat Lunak untuk keperluan editing sebesar Rp. 6.360.270,-
- e. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pembayaran tanggal 15 Agustus 2018 Biaya pengumuman Rp. 1.000.000,-
- f. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pembayaran tanggal 15 Maret 2018 sesuai SPD No.092/SPD/BBSDLP/III/2018. Tanggal 12 Maret 2018 dan SPP Nomor : 00136 tanggal 14 Maret 2018. Sebesar Rp. 5.560.000,-
- g. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pembayaran tanggal 31 Mei 2018 sesuai SPD No.234/SPD/BBSDLP/V/2018. Tanggal 16 Mei 2018 dan SPP Nomor : 00377 tanggal 29 Mei 2018. Sebesar Rp. 3.690.000,-
- h. CV. JATI PERKASA MANDIRI Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin tanggal 12 September 2018 Rp. 1.287.530.000,-
- i. PT. ARSADA KINERJA GEMILANG Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin tanggal 26 September 2018 Rp. 122.350.000,-

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,687.076.090.00	849.823.900,00	10.40
Jumlah Belanja Kotor	1,687.076.090.00	849.823.900,00	10.40
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1,687.076.090.00	849.823.900,00	10.40

B.2.5 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 tidak mengalami perubahan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pada tahun 2018 tidak terdapat belanja modal gedung dan bangunan pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	0,00	0,00

B.2.6 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2017. Belanja Modal Irigasi, Jembatan Jaringan antara lain oleh:

1. Pada tahun 2018 tidak terdapat belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	0,00	0,00

B.2.7 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2017 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pada tahun 2018 tidak terdapat belanja modal lainnya pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2018 dan 2017

Uraian	Realisasi Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	0,00	0,00

B.2.8 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2018 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pada tahun 2018 tidak terdapat belanja bantuan sosial pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2018 dan 2017

Uraian	Realisasi Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	0,00	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0. yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang Sudah dipertanggungjawabkan dan disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam Tabel berikut.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Jenis	TA 2018	TA 2017
1.	Bank BRI Cabang Bogor	0	0
2.	Uang Tunai	0	0
	Jumlah	0	0

Pada Bulan Januari 2018, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian mengajukan Uang Persediaan (GUP) sebesar Rp. 499.999.950 untuk dana operasional kegiatan. Saldo Kas di Bendahara pengeluaran mulai bulan tersebut adalah Rp. 499.999.500,- sudah di pertanggungjawaban Sampai dengan Bulan Desember 2018.

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar masing-masing Rp. 0. dan Rp. 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Nilai Kas di Bendahara Penerimaan pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian pada tanggal pelaporan adalah Rp. 0. Sampai dengan tanggal laporan semua pendapatan negara bukan pajak yang diterima oleh bendahara telah disetorkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No	Jenis	TA 2018	TA 2017
1.	Bank BRI Cabang Bogor	0	0
2.	Uang Tunai	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian disajikan dalam Tabel berikut.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No	Jenis	TA 2018	TA 2017
1.	Kas Lainnya dan Setara Kas	,00	0
2.	Dana kerjasama	,00	0
	Jumlah	,00	0

Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas pada Bendahara Pengeluaran Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian Rp. 0,-. Terjadi nilai bilaman ada pengajuan permohonan tersebut merupakan uang pengajuan LS yang terdiri dari kegiatan Perjalanan dinas sebesar Rp. 0,- dan Upah Lapang sebesar Rp. 0,- Pengajuan LS KPPN tersebut masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran. Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian.

C.1.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0. dan Rp. 0. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan dalam Tabel berikut.

Rincian Piutang Bukan Pajak

No	Jenis	TA 2018	TA 2017
1.	Piutang Bukan Pajak	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0. dan Rp. 0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang

belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No	Jenis	TA 2018	TA 2017
1.	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	34.257.600	0
	Penyisihan Piutang tidak tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	171,288	
	Jumlah	34.086.312	0

C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Sampai dengan laporan ini disusun tidak terdapat Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Jenis	TA 2018	TA 2017
1.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp.-171.288 dan Rp. 0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/ TGR	0	0	0
– Lancar	-171.288	0	0
– Kurang Lancar	0	0	0
– Diragukan	0	0	0
– Macet	0	0	0
Jumlah	-171.288	0	0
Total	-171.288	0	0

C.1.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0. dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Sampai dengan tanggal pelaporan, tidak terdapat Belanja dibayar di Muka pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian. Rincian Belanja Dibayar di Muka disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Rincian Belanja Dibayar di Muka

No	Jenis	TA 2018	TA 2017
1.	Belanja Dibayar di Muka	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.9 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

No	Jenis	TA 2018	TA 2017
1.	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.9 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.839.500,00 dan Rp. 1.359.900,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Persediaan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Barang Konsumsi	2.839.500,00	1.359.600,00
Jumlah	2.839.500,00	1.359.600,00

Total nilai Barang Persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp.0 (nol rupiah) yang terdiri dari Barang Persediaan dengan kondisi rusak sebesar Rp.0 (nol rupiah) dan kondisi usang sebesar Rp.0 (nol rupiah).

Persediaan pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian semuanya merupakan barang konsumsi TA. 2018 sebesar Rp. 2.839.500,- yang terdiri dari: Ballpoint Faster C-600 2802 Rp.56.400,- Pensin Steadler 2 – 42 Rp. 84.000,- Box File Bantex 4011 30.5 Rp, 152.500,- Order Bantex 1465 Rp. 305.000,- Stop Map Biola Rp.90.000,- Snelhektek Map Buffalo Rp. 195.000,- Post it Sign Here Rp. 123.000,- Postit Rp.195.000,- Kertas HVS 80 Gram A4 Rp. 772.800,- Kertas HVS Bola DUnia Rp. 748.800,- AmplopJaya Besar No. 90 223.4 Rp.117.000,-

C.1.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Jenis	TA 2018	TA 2017
1.	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	34.086.312	0
	Jumlah	34.086.312	0

C.1.11 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan Penjualan Angsuran untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan Penjualan Angsuran

No	Jenis	TA 2018	TA 2017
1.	Tagihan Penjualan Angsuran	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp. 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/ TGR	0	0	0
– Lancar	0	0	0
– Kurang Lancar	0	0	0
– Diragukan	0	0	0
– Macet	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Tagihan PA	0	0	0
– Lancar	0	0	0
– Kurang Lancar	0	0	0
– Diragukan	0	0	0
– Macet	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Total	0	0	0

C.2. Aset Tetap

C.2.1 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian per Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 13.152.236.000,00 dan Rp. 13.152.236.000,00,-.

Sampai dengan Desember 2018 tidak terdapat mutasi tambah ataupun kurang aset tanah pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	13.152.236.000,00
Mutasi Tambah	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	0
Transfer Keluar	0
Saldo per Desember 2018	13.152.236.000,00

Rincian Saldo Tanah per Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1.	320,00m2	Jalan Laladon Rt., Ciomas	128.000.000,00
2.	1.600,00m2	Jalan Laladon Rt., Ciomas	640.000.000,00
3.	2.000,00m2	Pahlawan/Dreded Rt., Bogor Selatan	2.420.000.000,00
Jumlah			3.188.000.000,00

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian per September 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 24.059.402.736,00 dan Rp. 22.378.686.916,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	22.378.686.916,00
Mutasi Tambah	1.680.715.820,00
Pembelian	1.680.715.820,00
Transfer Masuk	0,00
Pengembangan Nilai Aset	0,00
Mutasi Kurang	0,00
Transfer Keluar	0,00
Reklasifikasi Keluar	0,00
Saldo per Desember 2018	24.059.402.736,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-18.368.433.332,00
Nilai Buku per 30 Juni 2018	5.690.969.404,00

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa :

- Pembelian Peralatan Alat Mesin Bulan Januari Sampai Desember 2018 Rp. 1.680.715.820,00,-

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian per Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 31.683.564.000,00 dan Rp. 31.683.564.000,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	31.683.564.000,00
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	0.000
Mutasi Kurang	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	0.000
Saldo per 31 Desember 2018	31.683.564.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d Desember 2018	1.373.076.711.000

Nilai Buku per Desember 2018	30.310.487.287,00
------------------------------	-------------------

Penjelasan mutasi penambahan atas nilai Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah atas nilai Gedung dan Bangunan senilai Rp. 0.000 Karena tidak ada penambahan untuk renovasi atau pembangunan Gedung perkantoran Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, Jalan Tentara Pelajar No. 12 Bogor.

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian per Desember 2018 dan Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 786.401.000,00 dan Rp. 786.401.000,00.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	786.401.000,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	0
Saldo per Desember 2018	786.401.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d Desember 2018	-59.842.501,00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	726.558.499,00

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian per Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 337.857.500,00 dan Rp. 337.857.500,00.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	337.857.500,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	0
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per September 2018	337.857.500,00
Akumulasi Penyusutan s.d Desember 2018	0
Nilai Buku per 31 Desember 2018	337.857.500,00

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Sampai dengan laporan ini disusun, tidak terdapat Konstruksi dalam Pengerjaan pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian per Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. -19.801.352.954,00 dan Rp. -17.658.863.701,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	24.059.402.736,00	-18.368.433.332,00	5.690.969.404,00
2.	Gedung dan Bangunan	31.683.564.000,00	- 1.373.076.711,00	30.310.487.289,00
3.	Jalan dan Jembatan	86.955.000,00	-28.985.001,00	57.969.999,00
4.	Irigasi	699.446.000,00	-30.857.910,00	668.588.090,00
Akumulasi Penyusutan		50.218.108.282,00	-19.801.352.954,00	30.416.755.328,00

C.3. Aset Lainnya

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 27.728.454.093,00 dan Rp. 27.720.293.823,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Hak Cipta	3.375.000,00
Software	3.006.326.959,00
Hasil/kajian	24.710.591.864,00

Uraian	Nilai
Jumlah	27.720.293.823,00

Mutasi nilai Aset Tak Berwujud tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	3.007.901.959,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	24.720.293.823,00
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	0
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per Desember 2018	27.728.454.093,00
Akumulasi Penyusutan s.d Desember 2018	2.973.441.157,00
Nilai Buku per 30 Desember 2018	24.755.012.936,00

C.3.2 Aset Lain-Lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian per Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.254.621.350,00 dan Rp. 2.254.621.350,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut: Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	2.254.621.350,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Mutasi Kurang	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	0
Saldo per Desember 2018	2.254.621.350,00
Akumulasi Penyusutan s.d Desember 2018	2.253.928.350,00
Nilai Buku Desember 2018	693.000,00

Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan atas nilai Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah sebagai berikut:

Reklas Keluar dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (dari Aset Peralatan Mesin ke Aset yang tidak digunakan/Penghentian aset dari penggunaan) sebesar Rp. 2.253.928.350,00,-

C.3.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian per Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 22.774.794.111,00,- dan Rp.-4.963.102.308,00

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per Desember 2018, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Persediaan	2.839.500,00	0	2.839.500,00
2.	Tanah	13.152.236,00	0	13.152.236,00
3.	Peralatan dan Mesin	24.059.402.736,00	18.368.433.332,00	5.690.969.404,00
4.	Gedung dan Bangunan	31.683.564.000,00	1.373.076.711,00	30.310.487.289,00
5.	Jalan dan Jembatan	86.955.000,00	28.985.001,00	57.969.999,00
6.	Irigasi	699.446.000,00	30.857.910,00	668.588.090,00
7.	Aset Tetap Lainnya	337.857.500,00	0,00	337.857.500,00
8.	Hak Cipta	5.175.000,00	330.005,00	4.844.995,00
9.	Software	3.012.687.229,00	2.973.111.152,00	39.576.077,00
10.	Hasil Kajian/Penelitian	24.710.591.864,00	0,00	24.710.591.864,00
7..	Aset tetap yang tidak dapat digunakan Pemerintah	,00	,00	,00
Jumlah		97.750.754.829,00	22.774.794.111,00	74.975.960.718,00

C.3.4 Uang Muka Dari Kppn

Saldo Uang Muka dari KPPN per Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 0. dan Rp. 0.

Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Pada Bulan Januari 2018, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian mengajukan Uang Persediaan (GUP) sebesar Rp. 499.999.500 untuk dana operasional kegiatan. Saldo Kas di Bendahara pengeluaran mulai bulan tersebut adalah Rp. 499.999.500,-. Sampai dengan Bulan 31 Desember 2018, sudah di pertanggungjawaban sehingga Uang Persediaan Sudah Rp.0,-.

C.3.5 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 51.086.527,- dan Rp. 0. Tidak terdapat utang pihak ketiga pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
<i>Utang kepada Pihak Ketiga</i>	51.086.527,-	Pembayaran Listrik Bulan Desember 2018
Jumlah	51.086.527,-	

Kewajiban Jangka Pendek atau utang kepada pihak ketiga penyelesaian Beban Listrik Bulan Desember 2018 karena Pihak PLN pembayaran baru bisa diselesaikan pada bulan berikutnya sehingga untuk penyelesaian melalui Anggaran 2019.

C.3.6 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah
<i>Pendapatan Diterima di Muka</i>	0
Total	0

C.4. Ekuitas

C.4.1 Ekuitas

Saldo Ekuitas per Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 76.591.987.918,00 dan Rp. 70.778.621.157,00. Kenaikan (Penurunan) Desember 2018 dan 2017 Rp. 5.813.366.761 kenaikan Ekuitas Awal sekitar 8.21%. Surplus/Defisit – Laporan Operasional Desember 2018 Rp. -36.066.711.709,- Laporan Operasional 2017 Rp. – 31.821.339.239,- mengalami kenaikan/penurunan Rp. 3.245.372.471,- atau Rp. 10.19 %.

Koreksi yang menanmbah atau mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi atau kesalahan mendasar dan Penyesuain nilai aset, koreksi nilai persediaan selisih revaluasi aset tetap, koreksi nilai aset tetap non revaluasi koreksi lainnya 2018 dan 2017 kosong dan untuk traksaksi antar entitas 2018 Rp. 0,-, etitas 2017 Rp. -8.496.103.023,-.

Maka kenaikan penurunan ekuitas 2018 Rp. -1.667.113.727,- 2017 Rp. - 5.813.366.761,- atau kenaikan/penurunan jumlah Rp. -7.480.480.488,- sekitar Rp. – 126.67%. Maka Ekuitas Akhir 2018 Rp. 74.924.874.191,- 2017 Rp. 76.591.987.918,- atau kenaikan/penurunan Rp. -1.667.113.727,00,- mencapai Rp. -2.17%. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Desember 2018 dan Desember 2017 adalah masing-masing Pendapatan tersebut terdiri dari: sebesar Rp. 239.524.171,00 dan Rp. 127.219.219,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
Per Desember 2018 dan Desember 2017

Uraian	Realisasi Desember 2018	Realisasi 2017	.%
Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya	0,00	118.998.000,00	0,00
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	00,0	8.161.471,00	0,00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0.00	59.748	0,00
Pendapatan Sewa Tabah, Gedung, dan Bangunan	8.161.471,00	0,00	0,00
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey Pemetaan dan Pengembangan Iptek	219.432.700,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Tenaga Pekerjaan dan Informasi	11.930.000,00	0,00	0,00
Jumlah	239.524.171,00	127.219.219,00	201.81

Pendapatan negara bukan pajak di tahun anggaran per Desember 2018 sebesar Rp 239.524.171,00,- terdiri dari :

1. Pendapatan penjualan Peta Tanah Skala 1:50.000 Kab. Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur sebesar 7,343 MB dalam format SHP sebesar Rp. 7.343.300,- tanggal 1 Maret 2018, Nomor NTPN. B10D41FCV6HA1GUI.
2. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 1.170.000, tanggal 6 Maret 2018 dengan NPTN. EA3E53BC9SGA7IP2.
3. Pendapatan penjualan Peta Tanah rekomendasi Pengolahan sebesar Rp. 135.000,- tanggal 6 maret 2018 dengan NPTN 3E59A3BE85H98OP2.
4. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 450.000,- tanggal 9 Maret 2018 dengan NPTN. 9A7A35HLN7C61U2I.
5. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 1.100.000,- tanggal 19 Maret 2018 dengan NPTN. 60FC63GHAOVN2ANI.

6. Pendapatan penjualan Peta Arah sebesar Rp. 933.000,- tanggal 22 Maret 2018 dengan NPTN. 38B9655VQ21D7512.
7. Pendapatan penjualan Peta Tanah dan pendapatan hasil survai sebesar Rp. 814.000,- tanggal 29 Maret 2018 dengan NPTN. 8FAA419KG2C8MVCI.
8. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 405.000,- tanggal 5 April 2018 dengan NPTN. E3E694B3B7280611.
9. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 300.000,- tanggal 5 April 2018 dengan NPTN. E11814B4754FB6II.
10. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 15.161.000,- tanggal 13 April 2018 dengan NPTN. 7CB831A31E7DQQMI.
11. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 1.070.000,- tanggal 17 April 2018 dengan NPTN. F01E1310PMMUIIOI.
12. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 45.000,- tanggal 20 April 2018 dengan NPTN. 8F59E67JNJAPN529.
13. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 1.180.000,- tanggal 24 April 2018 dengan NPTN. 38BBC6CVTQKG2P42..
14. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 100.000,- tanggal 25 April 2018 dengan NPTN. 034A070G3PABE8SI.
15. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 405.000,- tanggal 30 April 2018 dengan NPTN. F84A827RNJ0OEN2.
16. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 2.128.000,- tanggal 30 April 2018 dengan NPTN. 5C96327RSKUH27N2.
17. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 245.000,- tanggal 14 Mei 2018 dengan NPTN. BDC948QMS70TUJI2.
18. Pendapatan penjualan Peta Tanah dan Pengolahan Data Reproduksi Peta, Jasa Tenaga sebesar Rp. 811.000,- tanggal 18 Mei 2018 dengan NPTN. 682384OG9ENITP32.
19. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 180.000,- tanggal 25 Mei 2018 dengan NPTN. 9282B7SERR544CEP.
20. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 591.000,- tanggal 30 Mei 2018 dengan NPTN. 87CE5170DMTKQE91.

21. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 45.000,- tanggal 30 Mei 2018 dengan NPTN. 337C171T4VDUP92.
22. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 180.000,- tanggal 31 Mei 2018 dengan NPTN. 88D682CJRJKJHV11.
23. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 1.039.000,- tanggal 5 Juni 2018 dengan NPTN. 168B840V6ACIPMMI.
24. Pendapatan penjualan Peta Tanah sebesar Rp. 9.112.000,- tanggal 7 Juni 2018 dengan NPTN. C264A5J5NAIRAA7I.
25. Pendapan Penjualan Peta Tanah Kabupaten Bekasi Skala 1 : 250.000 tanggal 2 Juli 2018 sebesar Rp. 200.000,- dengan Nomor NPTN 8 A3334LA5LQSE1V2.
26. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Tanah Kab. Lumajang skala 1 : 50.000 sebanyak 936 KB dalam Format SHP. Tanggal 04 Juli 2018 sebesar Rp. 936.000,- dengan Nomor NPTN 80813670656VBTG9.
27. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Tanah Kab. Lombok Timur Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, dan Kota Mataram, Skala 1;50.000 KB dalam format SHP sebesar Rp. 5.842.000,- Nomor NPTN EE1CA670O6KDEBG9 .
28. Pendapatan Hasil Penjualan Petah Peta Tanah Kab. Lombok Timur dan Lombok Utara sebanyak 2.840 KB dalam format SHP. Sebesar RP. 2.840.000,- Nomor NPTN : AD3367R26R752S11
29. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Tanah Kab. Garut Skala 50K sebanyak 32.4 KB dalam format SHP. Sebesar Rp. 32.400,- dengan Nomor NPTN 16DE87R2KGU80J11.
30. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Tanah Propinsi Bali skala 1:250.000 sebanyak 5.960 dalam format SHP Nomor NPTN D86E57R3SM5EID11
31. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Tanah Kab. Sijunjung, skala 1:50.000 sebanyak 1 lembar dalam format JPEG sebesar Rp. 45.000 dengan Nomor NPTN 9768623T5JP261L2.
32. Pendapatan Hasil Penjualan Tanah Kab. Pandeglang Skala 1:50.000 sebanyak 3.000 KB dalam format SHP tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp.3.000.000 dengan Nomor NPTN C24B03OEL28N47U1
33. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Tanah Kab. Tangerang, Garut Indramayu, Kutai Timur dan Kutai Kartanegara skala 1:50.000 sebanyak 14 lembar dalam format

PDF/JPEG tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp.630.000 dengan NPTN 58C8D4QHVTFEBRN2.

34. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Tanah Kabupaten Kediri Skala 1:50.000 sebesar 566 KB dalam format SHP. Tanggal 23 Agustus 2018 sebesar Rp.566.000 dengan NPTN D74911
35. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Tanah Kabupaten Bogor Skala 1:50.000 sebanyak 1 lembar format PDF/JPEG tanggal 23 Agustus 2018 sebesar Rp. 45.000 dengan NPTN D6AF01NTF038URJ1
36. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Tanah Kabupaten Pulang Pisang dan Kapuas skala 1:50.000 sebesar Rp. 2.910.000,- dalam format SHP tanggal 27 Agustus 2018 dengan NPTN EC22131GB1LLUL1
37. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Kesesuaian Lahan Kab.Timor Tengah Utara, Skala 1:50.000 sebanyak 5.580 KB dalam format SHP tanggal 17 September 2018 sebesar Rp.5.580.000,- dengan Nomor NPTN A2AEB65JTV215BII.
38. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Kesesuaian Peta Lahan Kab. Sintang Skala 1:50.000 sebanyak 6,980 KB dalam Format SHP tanggal 17 September 2018 sebesar Rp. 6.980.000,- dengan nomor NPTN E87D465LP1KO0UII.
39. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Tanah Kab. Bangka Barat, Pangkal Pinang, skala 1:50.000 sebanyak 60 lembar dalam format JPEG tanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 2.700.000,- dengan Nomor NPTN C74207BEB30PT3B2.
40. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Tanah Kab. Mandaling Natal Skala 1:50.000 sebanyak 1,950 KB dalam format SHP tanggal 26 September 2018 sebesar Rp. 1.950.000,- dengan nomor NPTN F91D839EEH8HSGF2.
41. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Tanah Kb. Sarolangun (CLIP), Skala 1:50.000,- sebanyak 50 KB dalam format SHP tanggal 26 September 2018 sebesar Rp. 50.000,- dengan nomor NPTN 3FD3439F1NU2U2F2
42. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Tanah Prov. Bali Skala 1:250.000 sebanyak 1 lembar dalam format JPEG tanggal 26 September 2018 sebesar Rp. Rp.45.000,- dengan Nomor NPTN F98FE39GQ6MJ3KF2.
43. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Kesesuaian Lahan Kab. Karawang, Nganjuk, Karo, Merauke, dan Sindenreng Rappang, Skala 1:50.000 sebanyak 70 lembar dengan format PDF tanggal 26 September 2018 sebesar Rp.3.150.000,- dengan Nomor NPTN 155B639HE005KOF2.

44. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Gambut Kec. Banama Tingang skala 1:50.000 sebanyak 50 KB dalam format SHP tanggal 26 September 2018 sebesar Rp. 50.000,- dengan Nomor NPTN 2C08F39I8FG98RF2.
45. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Gambut Kec. Banama Tingang dan Kahayan Tengah Skala 1:50.000 sebanyak 50 KB dalam format SHP tanggal 26 September 2018 Rp. 50.000,- dengan Nomor NPTN 6262639J7TAPHF2.
46. Pendapatan Hasil Penjualan Peta Tanah Kab. Way Kanan skala 1:50.000 sebanyak 8,430 KB dalam format SHP dengan Nomor NPTN 703513U9MRCCS071. Rp. 8.430.000,-
47. Pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan bulan oktober 2018 Rp. 8.161.471,-
48. Pendapatan Hasil Survai dan Pemetaan dan pengembangan Iptek bulan Oktober 2018 Rp.30.603.000,-
49. Pendapatan Jasa Lainnya bulan Oktober 2018 Rp. 720.000,-
50. Pendapatan Hasil Survai dan Pemetaan bulan Nopember 2018 Rp.4.320.000,-
51. Pendapatan Jasa Lainnya Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi Bulan Nopember 2018 Rp. 320.000,-
52. Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan Bulan Desember 2018 Rp.98.198.000,-
54. Pendapatan Jasa Tenaga Pekerjaan dan Informasi bulan Desember 2018 Rp. 315.000,-

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada Desember 2018 dan 30 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.990.075.515,00 dan Rp. 6.761.942.214,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai per Desember 2018 dan Desember 2017

Uraian	Desember 2018	Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	3.979.433.420,00	4.522.855.400,00	-12.01
Beban Pembulatan Gaji PNS	49.026,00	49.851,00	-1.65

Uraian	Desember 2018	Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Tunj. Anak PNS	66.043.512,00	76.692.098,00	-13.88
Beban Tunj. Beras PNS	122.751.900,00	97.622.160,00	-14,24
Beban Tunj. Fungsional PNS	737.180.000,00	941.525.000,00	-21.70
Beban Tunj. PPh PNS	55.875.859,00	65.586.205,00	-14.80
Beban Tunj. Struktural PNS	96.055.000,00	48.920.000,00	96.35
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	279.176.138,00	291.079.000,00	-0.55
Beban Tunjangan Umum PNS	81.650.000,00	78.025.000,00	4.64
Beban Uang Lembur	103.801.000,00	88.868.000,00	16.29
Beban Uang Makan PNS	430.184.000,00	462.005.000,00	-6.88
Jumlah	5.990.010.200,00	6.761.942.214,00	28.96

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada Desember 2018 dan Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.586.010.200,00 dan Rp. 3.305.807.500,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Desember 2018 dan Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per Desember 2018 dan Desember 2017

Uraian	Desember 2018	Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan baku	902.160.450,00	540.464.600,00	66.92
Beban Persediaan konsumsi	3.492.689.750,00	2.649.020.983,00	31.84
Beban persediaan lainnya	191.160.000,00	116.180.000,00	64.53
Jumlah	4.586.010.200,00	3.305.807.500,00	163.30

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada Desember 2018 dan Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.775.431.458,00 dan Rp. 8.775.349.336,00,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Desember 2018 dan Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per Desember 2018 dan Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tak Berwujud	0,00	1.980.000,00	-100,00
Beban Bahan	841.188.750,00	940.631.965,00	-10.57
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.297.621.687,00	1.655.530.000,00	38.74
Beban Barang Operasional Lainnya	102.278.470,00	105.079.400,00	-2.66
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	221.512.500,00	232.896.000,00	-4.88
Beban Honor Output Kegiatan	2.606.939.600,00	2.555.530.000,00	2.01
Beban Jasa Konsultan	19.470.000,00	11.000.000,00	77.00
Beban Jasa Lainnya			
Beban Jasa Profesi	493.060.000,00	690.300.000,00	-28.57
Beban Keperluan Perkantoran	1.362.722.340,00	1.198.020.983,00	13.74
Beban Langganan Air	10.822.430,00	6.758.700,00	60.12
Beban Langganan Listrik	686.720.221,00	652.364.703,00	5.26
Beban Langganan Telepon	19.470.000,00	11.000.000,00	77.00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.199.000,00	4.697.000,00	10.68
Beban Sewa	1.108.360.000,00	697.040.000,00	59.00
Jumlah	9.775.431.458.00	8.775.349.336.00	104.60

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada Desember 2018 dan Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.349.709.263,00 dan Rp. 1.474.649.220,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Desember 2018 dan Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per Desember 2018 dan Desember 2017

Uraian	Desember 2018	Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	415.929.960,00	386.848.800,00	7.51
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	879.605.563,00	821.125.920,00	7.12
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	33.993.750,00	46.437.000,00	-26.79

Uraian	Desember 2018	Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Persediaan suku cadang	20.180.000,00	220.237.500,00	-90..83
Jumlah	1.349.709.263	1.474.649.220,00	-102.99

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada Desember 2018 dan Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 10.372.833.690,00 dan Rp. 8.472.058.114,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Desember 2018 dan Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per Desember 2018 dan Desember 2017

Uraian	Desember 2018	Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	9.867.420.990,00	7.649.276.194,00	28.99
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	64.935.000,00	92.100.000,00	-29.49
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	441.477.700,00	730.681.920,00	-39.71
Jumlah	10.372.833.690,00	8.472.058.114,00	-40.21

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada Desember 2018 dan Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.306.318.904,00 dan Rp. 3.612.767.627,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Desember 2018 dan Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi Desember 2018 dan Desember 2017

Uraian	Desember 2018	Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Amortisasi Hak Cipta	61.076,00	48.218,00	26.66
Beban Amortisasi Software	104.900.193,00	154.944.000,00	-32.29
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	915.384.474,00	912.221.927,00	0.34
Beban Penyusutan Irigasi	20.571.940,00	13.949.914,00	47.47
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	19.323.334,00	46.814.673,00	0.34

Uraian	Desember 2018	Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0,00	4.198.000,00	-100
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.246.077.887,00	2.480.590.895,00	-9.45
Jumlah	3.306.318.904,00	3.612.767.627,00	-125.99

D.8. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Lancar

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Lancar terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Lancar Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per Desember 2018 dan Desember 2017

Uraian	Desember 2018	Desember 2017	% Naik / Turun
Pendapatan dari pemindahan tanganan BMN Lainnya	0,00	8.800.000,00	-100
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	693.000,00	-100
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	0,00	,00	-100
Jumlah	0,00	8.107.000,00	-100

D.9. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per Desember 2018 dan Desember 2017

Uraian	Desember 2018	Desember 2017	% Naik / Turun
Penerimaan Kembali Belanja barang tahun yang lalu	0,00	448.355.054,00	100
Penerimaan Kembali Belanja barang tahun yang lalu	74.759.650,00	0,00	00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	5.417.100,00	100

Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	616.500,00	7.863.600	- 92.16
Jumlah	74.143.150,00	454.015.554,00	492.16

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 76.591.987.918,00 dan Rp. 70.778.621.157,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. -35.066.711.709,00 dan Rp. -31.821.339.238,00 Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

E.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. -0,00 dan Rp. 8.496.103.023,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.5. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp.0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.6. Transaksi antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 33.399.597.982,00,- dan Rp. 29.138.602.976,00. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2018 .

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	33.205.728.089,00
Diterima dari Entitas Lain	-314.283.821,00
Transfer Keluar	0,00
Transfer Masuk	1.735.714,00

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Pengesahan Hibah Langsung	506.418.000,00
Kenaikan penurunan Ekuitas	1.667.113.727,00

E.7. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 74.924.874.191,00 dan Rp. 76.591.987.918,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca pada Kantor Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian sampai dengan Semester II Tahun Anggaran 2018.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

1. Organisasi Pengelola Anggaran

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 06/Kpts/OT.160/1/2015 tanggal 07 Januari 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 5118/Kpts/KU.410/12/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sedangkan Pejabat yang diberi kewenangan untuk Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen dan Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM didasarkan pada Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 03/KU.410/I.8/01/2015 tanggal 09 Januari 2015 menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 04/KU.410/I.8/01/2015 tanggal 9 Januari 2015 menetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada BBSDLP. Adapun rincian dari pejabat tersebut yaitu :

- a) Kuasa Pengguna Anggaran : Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr
- b) Pejabat Penandatanganan SPM : Dra. Nurhayati M.Sc
- c) Pejabat Pembuat Komitmen : Drs. Mujiono
- d) Bendahara Penerimaan : Budi Santoso
- e) Bendahara Pengeluaran : Tedy Januar, SE
- f) Operator BMN : Asep Saepulloh
- g) Operator SAK/SAIBA : Wiwit Winarto, Amd

2. Tindak Lanjut Audit Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah melakukan Audit Kinerja pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) terhadap kegiatan-kegiatan BBSDLP selama tahun anggaran 2016/2018. Kriteria yang digunakan dalam audit ini adalah PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI), Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Perpres No. 70 tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Berdasarkan audit tersebut Irjen telah memberikan LHP No. R.259/PW.130/G.4/11/2016 pada tanggal 14 November 2016. BBSDLP telah menindaklanjuti LHP tersebut di atas dengan surat pengantar ke Sekretaris Badan Litbang Pertanian beserta tanggapan tindak lanjut.

Adapun hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menerangkan bahwa terdapat kerugian negara sebesar Rp. 51.634.363,11 (Lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga koma sebelas rupiah) yang terdiri dari:

- a. kekurangan perhitungan tunjangan kinerja pegawai BBSDLP senilai Rp. 845.100,-. Sudah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara melalui bendahara penerimaan Biro Keuangan dan Perlengkapan pada tanggal 28 November 2016 dengan nomor NTPN: 0CDC0FB1B1121TDK2
- b. Kemahalan jaringan irigasi KP Pusakanagara oleh PT. Manunggal Sejati Abadi sebesar Rp. 7.461.870. Sudah disetor ke negara tanggal 5 Desember 2016 nomor NTPN E008B2F5MUFRNCII.
- c. Kemahalan jaringan irigasi KP Pusakanagara oleh CV. Ufuk Perintis sebesar Rp. 4.101.000. Sudah disetor ke negara tanggal 5 Desember 2016 nomor NTPN 41DCE2F62J0PEKII.
- d. Keterlambatan pekerjaan Implementasi Desain Pengelolaan Air KP Tlekung oleh CV Reksa Abadi sebesar Rp. 1.379.100. Sudah disetor ke negara tanggal 5 Desember 2016 nomor NTPN CCD872F6ISI32CII.
- e. Keterlambatan pekerjaan Implementasi Desain Pengelolaan Air KP Tlekung oleh CV. Karya Putra sebesar Rp. 2.341.500. Sudah disetor ke negara tanggal 5 Desember 2016 nomor NTPN 7DF462F6RT8Q3JII.
- f. Kemahalan pekerjaan pada KP Pandean oleh CV. Bina Heksa sebesar Rp. 225.000. Sudah disetor ke negara tanggal 5 Desember 2016 nomor NTPN C37CF2F7AO800EII.

- g. Kemahalan pekerjaan pada KP Pandean oleh CV. Lumbung Konstruksi sebesar Rp. 6.233.000. Sudah disetor ke negara tanggal 5 Desember 2016 nomor NTPN A58942F7IACJAOII.
- h. Kekurangan volume pekerjaan pada KP Pandean oleh CV. Bina Heksa sebesar Rp. 11.348.350. Sudah disetor ke negara tanggal 5 Desember 2016 nomor NTPN 8D29B2F7SPLE2SII.
- i. Kekurangan volume pekerjaan pada KP Tlekung oleh CV. Reksa Abadi sebesar Rp. 7.355.293. Sudah disetor ke negara tanggal 5 Desember 2016 nomor NTPN CCA1B2F85H24CAII.
- j. Kelebihan pembayaran perbaikan pagar roboh oleh CV. Dwi Sapta Jaya sebesar Rp. 10.344.152. Sudah disetor ke negara tanggal 5 Desember 2016 nomor NTPN 6627C2F8H5J23III.
- k. Kekurangan Pembayaran Pajak Pihak Ketiga PT. REKSA JAKARTA Pekerjaan Pembuatan PETA DIGITAL, Sudah di Setor ke Negara tanggal 31 Maret 2018 Sebesar RP. 149.508.100,- Nomor NPTN. BA7BD1AE95947LLI
- l. Kekurangan Pembayaran Analisa Tanah Pihak Ketiga PT. REKSA JAKARTA Perkerjaan Analisa Tanah sebesar Rp. 8.161.141.471,- dengan Nomor NPTN : 6D9A81AHFA792SLI tanggal 31 Maret 2018.

3. Rekening Pemerintah

Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor : 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, maka Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian telah melaporkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor untuk meminta persetujuan penggunaan Rekening Bank. Persetujuan Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara tertuang dalam surat Nomor : S.0050/WPB.12/KP.04/2008 tanggal 7 Januari 2008 atas Rekening Nomor : 0012-01-000138-305 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Bogor. Sementara untuk rekening nomor: 133-00-9001331-9 di Bank Mandiri Kantor Cabang Bogor Kapten Muslihat, yang selama ini digunakan untuk menampung kegiatan kerjasama ditutup. Penutupan rekening telah dilakukan pada 27 Februari 2008, dan saldo penutupan rekening sebesar Rp 3.366.551,- telah disetor ke Kas Umum Negara pada 9 Pebruari 2009. Surat Keterangan Penutupan Rekening yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri diterbitkan melalui Surat Nomor: 5.Sp.BKM/382/2010 tanggal 20 Desember 2010. Dalam rangka penertiban rekening pemerintah dimaksud, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian telah diaudit

oleh Tim BPKP sesuai dengan Surat Tugas Nomor: ST-089/D1/02/2009 tanggal 29 Januari 2009. Audit dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2009. Semua saran sudah ditindaklanjuti dengan lengkap. Dan untuk rekening kerjasama HIBAH sampai tahun 2014 masih dibuka dan dengan posisi saldo per 31 Desember 2014 adalah Rp. 0,- pada rekening tersebut. Pada tanggal 9 maret 2015 Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian telah melakukan penutupan rekening Bank BRI Cabang Bogor Dewi Sartika dengan Nomor Rekening : 0012.01.001868.30.1 atas nama ICCTF-BBSDLP yang selama ini digunakan untuk menampung kegiatan hibah Pengelolaan Berkelanjutan Lahan Gambut Terdegradasi untuk Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mengoptimalkan produktivitas tanaman. Penutupan rekening tersebut sesuai dengan keterangan Bank BRI Nomor : B.1728-KC-XIV/PEL/03/2015 tanggal 09 Maret 2015 dengan saldo Rp 0,- Untuk pelaksanaan Kegiatan APBN 2015, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 semua satuan kerja harus mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening kembali. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian telah mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening kembali yang selama ini menggunakan Rekening pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Bogor Dewi Sartika dengan Nomor Rekening: 0012-01-000138-30-5. Pembukaan Rekening tersebut dimaksudkan untuk menampung uang keperluan Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran. Pembukaan Rekening dimaksud telah mendapatkan persetujuan kembali dari Menteri Keuangan. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor selaku Kuasa Bendahara Umum Negara melalui Surat Persetujuan Nomor : S-1128/WPB.13/KP.023/2015 tanggal 10 April 2015, Dengan nomor rekening 001201000138305 dan nama rekening BPg 023 BBPP Sumberdaya Lahan Pertanian. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan Penerimaan Negara, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian telah mengajukan pembukaan rekening untuk bendahara penerimaan yang menampung kegiatan PNBP. Rekening yang dimiliki oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan Nomor: S-1435/WPB.13/KP.023/2015 tanggal 06 Mei 2015 adalah Bank BRI Cabang Bogor Dewi Sartika: 0012-01-002710-30-7 dengan nama rekening BPN 023 BBPP Sumberdaya Lahan Pertanian.

4. Kemitraan dengan pihak III

1. Hibah

Pada tahun 2018 Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian mendapatkan hibah langsung luar negeri dalam bentuk uang tunai untuk melaksanakan kegiatan penelitian dari *Research Council of Norway* tentang: *Biochar as an Adaptation Strategy for Climate Change* senilai NOK 637.500. Hibah kerjasama tersebut dilaksanakan selama 3 tahun dan dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama Nomor 243789 dan nomor register 2AH9JM5A. sampai dengan sekarang masih berlangsung berkelanjutan

2. Kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

- a. Pada tahun 2016 Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

5. Sertifikat ISO 9001:2008

Sejak 2010, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian telah melaksanakan Reformasi Birokrasi. Kesiapan tersebut didukung dengan telah diperolehnya Sertifikat ISO 9001:2008 dari PT Mutuagung Lestari, dengan Nomor Sertifikat: 10/QM/200 tanggal 1 Februari 2010. Dan pada Tahun Anggaran 2015 ini, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian telah berhasil mempertahankan Sertifikat tersebut setelah dilakukan Resertifikasi pada tanggal 25 s/d 26 Mei 2015. Sertifikat Registrasi dengan Nomor Sertifikat Baru:QMS/200 tanggal 3 April 2014 telah dipertahankan melalui *surveillance* dengan urut keterangan Nomor:141.26/SKET- MUTU/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015. Resertifikasi telah dilakukan kembali pada tahun 2016.

Resertifikasi berupa *surveillance* yang dilakukan pada 2016, dipergunakan sebagai dasar untuk memperpanjang sertifikasi. Ke depannya, PT MAL juga akan melakukan kegiatan audit ulang (re-sertifikasi) sebelum tanggal berakhirnya sertifikat.

Hasil dari pelaksanaan *surveillance* tersebut adalah bahwa ditemukan sejumlah ketidaksesuaian atas pelaksanaan sistem mutu pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian sebagai berikut: 6 (enam) temuan Ketidakesuaian Minor, dan 3 (tiga) merupakan CFA (Comment For Action) atau saran. Temuan Minor tersebut adalah (1) Pengendalian Dokumen; (2) Manajemen; (3) Sumber Daya Manusia; (4) Internal Audit; (5) Evaluasi; dan (6) Analisis Data. Sedangkan untuk temuan yang bersifat Saran (CFA) adalah: (1) Referensi Silang Identifikasi Proses dan Penerapannya, (2) Rekaman Hasil Evaluasi Pencapaian

Sasaran Mutu dan Rencana Tindakan Selanjutnya, dan (3) Laporan Pemeriksaan Infrastruktur dan Lingkungan Kerja.

Setelah Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian memperbaiki saran-saran dan menindaklanjuti sesuai dengan persyaratan melalui telah diterbitkan Sertifikat Registrasi Nomor QMS/200 setelah PT Mutu Agung Lestari menyatakan bahwa semua finding yang diidentifikasi telah dinyatakan CLOSE OUT. Sertifikat tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan 21 September 2018. Masa berlakunya sertifikat ini tidak sampai 3 (tiga) tahun, karena adanya perubahan Sistem Manajemen Mutu dari ISO 9001:20087 menjadi ISO 9001:2015. Masa transisi diberikan maksimal sampai dengan 21 Desember 2018.

Dengan diterbitkannya Sertifikat Registrasi Nomor QMS/200 tersebut, PT Mutu Agung Lestari menyatakan bahwa Sertifikat ISO 9001:2008 Nomor QMS/200 dipertahankan dengan ruang lingkup yang sama. Dengan demikian, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian berhak mendapatkan Logo Mutu dan Logo Sertifikasi secara elektronik, berhak mendapatkan Pedoman Penggunaan Logo Mutu dan Logo Sertifikasi sebagai dasar dalam penggunaan logo untuk media publikasi dan literatur kantor, kertas surat, brosur, kartu nama, poster, spanduk, kalender, media elektronik, website, perlengkapan display, dan kendaraan dinas Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian.